

BAB III
PUSA DALAM REVOLUSI SOSIAL
DI ACEH

A. Sebab Umum.

Terjadinya Revolusi Sosial di Aceh banyak dipengaruhi oleh keadaan sosial ekonomi dan politik di Aceh sendiri, juga oleh pengaruh dari luar, baik berupa norma maupun kebudayaan dari luar, dan juga hubungan-hubungan ulama sebagai pengendali politik dengan daerah-daerah tetangganya.

Dalam pembahasan ini, sebab umum yang menyebabkan terjadinya Revolusi Sosial ini dibagi menjadi dua.

a. Faktor Intern.

i. Kebencian Masyarakat terhadap Uleebalang.

Suasana politik yang berubah, sejak Aceh di bawah kekuasaan Kolonial Belanda, kebencian masyarakat terhadap uleebalang sudah mulai tercatat dalam sejarah Aceh. (Lihat bab II, halaman 18)

Puncak kebencian mulai terlihat setelah Belanda mengadakan perubahan besar-besaran struktur pemerintahan di Aceh. Walaupun perubahan struktur pemerintahan itu juga seakan-akan membatasi kebebasan/kesewenangan uleebalang, tetapi tetap tidak menggeser kedudukan uleebalang sebagai alat Belanda dalam memproyeksikan kebijaksanaan -

kebijaksanaan politis maupun ekonomisnya.

Perlu ditambahkan di sini kutipan-kutipan tentang kesewenangan uleebalang terhadap masyarakatnya untuk memperjelas sebab kebencian masyarakat Aceh kepadanya.

"Uleebalang-uleebalang dalam daerahnya, baik dalam legislatif, maupun dalam lapangan exsecutif, tidak memberikan kemungkinan bagi penduduk melahirkan cita-citanya bila cita-cita itu tidak sesuai dengan peraturan-peraturan atau kebiasaan yang berlaku."¹

Sebagaimana apa yang terjadi dalam peristiwa M. Nur Al Ibrahimy dengan syairnya, Sewaktu ia mengajarkan syair yang berisikan kritik terhadap Belanda dengan tujuan untuk menanamkan rasa benci kepada Belanda dan rasa cinta kepada tanah airnya. Oleh karena peristiwa itu, maka M. Nur Al Ibrahimy dijatuhi hukuman tidak diperkenankan mengajar selama 2 tahun. Sedangkan yang menjatuhi hukuman tersebut temahnya sendiri, seorang uleebalang, yang bernama M. Daud Syeh. Dalam hal ini M. Nur Al Ibrahimy mengemukakan perasaannya .

"Saya yakin bahwa T.M. Daeed Syeh, Zelfbestuurder van Idi Rayeuk yang berpendidikan Barat tidak pernah berniat berbuat sewenang-wenang; terhadap saya, karena antara saya dan beliau terdapat hubungan yang akrab, begitu pula antara orang tua

¹ M. Nur Al Ibrahimy, Teungku Muhammad Daud Beureueh, PT. Gunung Agung, Jakarta, tahun 1986, halaman 87.

saya dan orang tua beliau terjalin hubungan yang intim. Tetapi Belanda yang memaksa beliau menjatuhkan hukuman yang sewenang - wenang terhadap saya. Celakanya, dalam hal ini T.M. Daeed Syah tidak berdaya menolak paksaan Belanda oleh karena beliau harus setia kepada sumpah yang diucapkannya dalam Korte Verklaring yang telah ditanda tangannya."²

Dalam tulisannya yang lain M. Nur Al Ibrahimy lebih tegas lagi dalam membicarakan tentang uleebalang.

"Oleh sebab dipaksa oleh keadaan yang senantiasa labil di Aceh itu, maka sikap Belanda terhadap uleebalang sangat lunak. Dari sebab itulah terbuka kesempatan bagi para uleebalang untuk berbuat sewenang-wenang dengan leluasa terhadap rakyat dengan tiada pengawasan dan teguran dari atas - annya."³

Sikap lunak Belanda terhadap uleebalang ini merupakan sistem politiknya untuk mempermudah terlaksananya - urusan mereka di Aceh. Tetapi sikap lunak inilah yang menyebabkan para uleebalang bersikap sewenang-wenang terhadap masyarakatnya. Cara lain yang dijalankan oleh Belanda ialah mengeduk domba antara uleebalang dan ulama, tetapi cara kedua ini bahkan mempercepat hilangnya pamor uleebalang dan Belanda, sebab masyarakat Aceh yang masih kuat terikatannya dengan agama Islam, tidak akan memihak

2 Ibid., halaman 88.

3 Ibid.

kepada Belanda dan uleebalang, tetapi kebanyakan mereka memihak kepada ulama. Apalagi kesewenang-wenangan uleebalang di Aceh makin lama makin menjadi.

"Dalam taktik atau kebijaksanaan politiknya, memperkuat penjajahan di Aceh, Belanda menggunakan siasat dua muka.

Uleebalang sebagai kepala pemerintahan (adat) dihadapinya dengan lunak dan bahkan dimanjakan. Sebaliknya, ulama sebagai pemimpin agama secara berangsur dihimpit dan ditekan.

Dalam berbagai kesempatan kedua golongan ini diadu domba dengan cara yang licik dan halus, karena telah merasa dan apalagi pula akan memerintah secara keturunan. Uleebalang mulailah berbuat sewenang-wenang atas rakyat. Perbuatan aniaya, seperti korupsi dan merampas harta rakyat semakin merajalela, terutama, setelah dilihatnya bahwa Belanda membantu dan memanjakannya."⁴

Oleh karena itu masyarakat Aceh sangat kuatir melaporkan tindakan uleebalang kepada Conteleur (Belanda), karena tidak akan mendapat tanggapan yang baik, Kemungkinan si pelapor sendiri yang akan mendapat sanksi karena telah mencoreng nama baik uleebalang.

Memurut catatan Paul Van d'veer dalam mengomentari laporan Kern tentang pembunuhan-pembunuhan di Aceh, bahwa pembunuhan-pembunuhan tersebut disebabkan kebencian masyarakat kepada uleebalang.

⁴ Drs. Ismuha, Ulama Aceh Dalam Perspektif Sejarah, CV. Rajawali, Jakarta, 1983, hal. 133.

"Barangkali laporan Kern adalah yang paling jelas pengungkapannya, ketika dia berbicara tentang rasa dendam terhadap kaum hulubalang sendiri, sebagai salah satu sebab yang paling banyak menimbulkan pembunuhan di Aceh. Walaupun dalam hal ini orang Eropa yang menjadi korban, karena si pembunuh yang memperhitungkan kematiannya dapat diharapkan dengan perbuatan itu telah melaksanakan suruhan agama yang termulia, rasa dendam tidak langsung ditujukan pada mereka. Pada hakekatnya adalah perampasan kekuasaan yang dalam hal-hal demikian menyebabkan pembunuhan."⁵

Dalam harian Kompas, 16 Januari 1983, dikemukakan bahwa hulubalang adalah calon sekutu, dengan tujuan mengeruk kekayaan rakyat atau berniaga dengan cara paksa.

"... bahwa menurut pendapat Snouck, Perang Aceh dikobarkan oleh ulama, sedang hulubalang bisa menjadi calon sekutu karena kepentingannya adalah berniaga."⁶

Selain itu, kebencian rakyat Aceh yang sudah banyak berfihak makin menjadi, setelah mendengar desas-desus usaha-usaha sebagian hulubalang untuk mempermudah kembalinya Belanda, setelah terjadinya kapitulasi Jepang terhadap sekutu. Ini merupakan suatu pengkhianatan terhadap masyarakat yang kedua kalinya.

⁵ Paul Van 'T Veer, *Atjeh De Corlog (Perang Aceh)*, Grafiti Pers, Jakarta, 1985, hal. 249.

⁶ M. Nur Al Ibrahimy, *Tgk. Daud Beureueh*, Op.Cit, hal. 231.

"Golongan yang menginginkan pengembalian kekuasaan Belanda (hulubalang), mulai berusaha mengumpulkan bahan - bahan mengenai tingkah laku dan perbuatan golongan yang disebut terakhir (ulama), selama masa pendudukan Jepang".⁷

Tindakan hulubalang ini sudah jelas sebagai suatu petunjuk bahwa mereka tidak menyadari kehendak masyarakat yang ingin terlepas dari semua bentuk penjajahan. Inilah yang makin menambah suhu kemarahan dan kebencian masyarakat Aceh kepada hulubalang.

Berfihaknya hulubalang kepada musuh ini, menunjukkan bahwa mereka telah menyalahgunakan kepercayaan masyarakat terhadap mereka, sebagai tokoh adat, dan sebaliknya mengokohkan posisi ulama sebagai tokoh mereka yang sebenarnya.

"... tidaklah mengherankan sama sekali bahwa golongan ulama menjadi semakin disukai rakyat. Mereka itu memberantas penyalahgunaan kekuasaan para hulubalang yang menguasai hidup, mati, perkawinan dan pengadilan rakyat mereka."⁸

Kebencian masyarakat Aceh terhadap uleebalang bersamaan dengan pudarnya pamor mereka ditengah-tengah masyarakat. Apalagi semangat mendukung kemerdekaan Republik Indonesia sewaktu kapitulasi Jepang semakin menjadi-jadi.

7 Ibid, halaman 83

8 Paul van 'T Verr, Atjeh De Oorlog (Perang Aceh), Op.Cit., hal. 231.

Sikap demikian ini didukung oleh ulama dan sebagian kecil dari uleebalang yang sependirian dengan mereka. Di tengah-tengah meletupnya semangat kemerdekaan ini, para uleebalang yang dipimpin oleh T. Daud Cumbok (uleebalang pro Belanda) justru mengharap kembalinya penjajah datang ke Aceh.

Dua sikap yang bertentangan ini terus berlanjut sehingga para ulama, diketuai oleh Tgk. Daud Beureueh dan Teungku Oemar Tiro sebagai pelindung, membicarakan keadaan Aceh sikap uleebalang pro Belanda terhadap keinginan masyarakat Aceh untuk merdeka.

Pertemuan itu dilanjutkan dengan pertemuan kedua yang diadakan di Aceh Besar. Pertemuan itu menghasilkan keputusan sebagai berikut :

"Apa isi dan arti perang suci ini bagi para uleebalang yang berkepala batu ini sudah cukup terang dengan keputusan pertemuan ulama di Aceh Besar. Yakni :

1. Hukum perang sabil pada masa sekarang fardlu Uain (bagi setiap muslim).
2. Belanja peperangan didapat dari a) Baitul Mal b) Zakat dan c) Sokongan dari hartawan.
3. Hukumnya pengkhianatan sama dengan si kafir."⁹

Kini jelas bagi masyarakat Aceh bahwa pengkhianat masyarakat dan tujuan sucinya dianggap kafir. Sikap de-

⁹ Anthony Reid, Perjuangan Rakyat, Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hal. 327.

mikian menunjukkan bahwa kebencian masyarakat Aceh terhadap uleebalang pro Belanda sangat besar.

ii. Kerawanan Sosial.

Feodalisme dalam sistem perekonomian yang dijalankan oleh para penguasa daerah (uleebalang) pada masa penjajahan Belanda di Aceh sudah terlihat di mana-mana. Uleebalang dalam mengetrapkan sistem perekonomian ini hanyalah merupakan alat pemerintah Belanda yang menguasai tanah dan bertugas mengatur hasil panen padi masyarakat. Keadaan seperti terus berlanjut sampai pada zaman Jepang.

Walaupun kedatangan Jepang di Aceh dibantu dan dipermudah oleh beberapa ulama, dengan tujuan agar Belanda dapat secara cepat terusir dari wilayah Aceh, tetapi kedatangan Jepang di Aceh tidak banyak merubah kedudukan ulama, dan juga kedudukan uleebalang. Perubahan yang diharapkan oleh ulama yang membantu falam struktur pemerintahan tidak terjadi sebagaimana yang diharapkan (lihat keadaan ekonomi dan politik Aceh di zaman Jepang, bab II, halaman (15 - 40)).

Zaman Jepang di Aceh adalah masa yang sangat sulit. Kerawanan sosial di masa itu sangat menyolok. Kerawanan itu juga disebabkan oleh kebijaksanaan Jepang yang sangat berat di bidang ekonomi, khususnya tanaman beras. Walaupun penghasilan dalam bidang ini lebih tinggi bila dibanding zaman Belanda, tetapi penghasilan yang tinggi itu

tidak dirasakan oleh masyarakat Aceh. Hal ini dapat dilihat kebijaksanaan Jepang di dalam membeli hasil panen masyarakat Aceh dan besarnya eksport beras pada awal masuknya Jepang di Aceh (lihat keterangan tentang sosial ekonomi di Aceh pada zaman Jepang, bab II, halaman 32).

Semestinya bila dilihat dari luas tanah pertanian di Aceh, dibanding dengan daerah-daerah yang ada di Jawa, maka tingkat kemakmuran dalam masalah pangan di Aceh lebih baik. Tetapi kebijaksanaan Jepang yang berat itu makin lama makin membuat masyarakat hidup dalam kesengsaraan.

"Meskipun perbandingan luas tanah dan jumlah penduduk membikin pulau Sumatra (termasuk Aceh, pent.) tidak begitu mudah terserang kelaparan dari pada Jawa, tetapi menjelang tahun 1945, kondisinya sangatlah parah."¹⁰

Hamka dalam bukunya "Kenang-kenangan Hidup" menerangkan bagaimana sengsaranya masyarakat Aceh sewaktu Jepang mengeluarkan kebijaksanaan ekonominya pada masyarakat.

"Kemerdekaan yang telah dijanjikan hanya Tipuan. Kesengsaraan telah lepas dari dada, telah tiba di leher. Di kebun-kebun, kuli-kuli telah banyak yang mati karena tidak makan dan sudah telanjang."¹¹

¹⁰ Ibid, hal. 224.

¹¹ Hamka, Kenang-kenangan Hidup, Kuala Lumpur, 1966, hal. 270.

Bahkan suatu hari Hamka mengkhitankan anaknya dengan acara ramai-ramai. Perayaan itu dicerca oleh masyarakat, bahkan beliau dipandang tidak prihatin dengan keadaan sekelilingnya.

Sikap dan pandangan seperti ini menunjukkan bahwa amatlah sengsara kehidupan masyarakat sewaktu Jepang berkuasa, sehingga mereka sangat sensitif terhadap perayaan khitan yang diselenggarakan oleh Buya Hamka.¹²

Kebijaksanaan Jepang dalam masalah ekonomi diatas juga menimbulkan keresahan di Pulau Besar (Aceh Besar), yang menimbulkan protes masyarakat setempat terhadap Jepang. Proses ini dikenal dengan Peristiwa Pendidik Pulau Beras.

Peristiwa Pulau Beras ini berawal dari sikap serentak penduduk Pulau Beras tidak setuju terhadap kebijaksanaan ekonomi pemerintah Jepang di Aceh. Sikap demikian oleh pemerintah Jepang dianggap sikap menentang terhadap kebijaksanaan pemerintah dan para pelakunya harus dikenakan sanksi. Peristiwa ini terjadi pada bulan Maret April 1944.

"Selama Nippon datang ke pulau Beras, sekalian orang-orang kampung dipaksa bekerja pada tentara, dan barang-barang makanan seperti telur, sayuran dan beras dijual pada mereka dan dibayar dengan harga yang murah, sedang untuk keperluan orang -

¹² Wawancara dengan Rusdi Hamka, Jakarta, tgl. 4/8/1988. (Lampiran IV).

orang kampung sama sekali tidak ada gunanya. Delapan petani dituduh ikut serta dalam menghasut penduduk desa untuk menolak kerja paksa, menolak tugas ronda keamanan dan menolak menjual bahan makanan. Seorang mengakui setuju membunuh kepala kampungnya. Pemimpin peristiwa ini dihukumi mati."¹³

Sudah jelas ketidak stabilan keadaan ekonomi di Aceh ditentukan oleh keadaan politik di Aceh itu sendiri. Hal ini menyebabkan terjadinya kegoncangan-kegoncangan sosial yang mengarah kepada suasana sosial yang rawan.

Belanda maupun Jepang keduanya menempatkan uleebalang sebagai rekan dan alat untuk melaksanakan kebijaksanaan ekonomi maupun politiknya. Jadi kerawanan sosial di Aceh tidak dilepaskan dari keikutsertaan uleebalang di dalamnya.

iii. Tersingkirnya Ulama

Bila dilihat sejarah Aceh, sejak penyerahan ke-
daulatan Aceh oleh sebagian uleebalang kepada Belanda pada tahun 1873 hingga masa pendudukan Jepang, maka tersingkirnya ulama dalam pemerintahan Aceh terjadi dua kali. Pertama, sewaktu Belanda menyatakan berkuasa di Aceh, dan kedua, sewaktu Jepang mulai mengadakan perubahan struktur pemerintahannya setelah berkuasa beberapa bulan di Aceh.

¹³ Anthony Reid, Perjuangan Rakyat, Revolusi dan Hancurnya Kerajaan di Sumatra, Op.Cit., hal. 204

Tujuan yang kontradiktif di antara dua tokoh di Aceh di dalam memandang perjuangan masyarakatnya dapat menjauhkan satu sama lainnya. Bila yang satu berkuasa sudah jelas lainnya tersingkir, karena latar belakang dan tujuannya berbeda, begitu pula cara-cara yang ditempuh di dalam mencapai tujuannya.

Sewaktu para uleebalang - pro Belanda - menyerahkan kedaulatan Aceh kepada Belanda, secara otomatis, Belanda mengangkat mereka sebagai kawan dan saka guru di dalam masyarakat Aceh. Sebaliknya, ulama sebagai oposisi pasti tersingkir.

Makin luas kekuasaan Belanda di Aceh makin jauh pula tersingkirnya ulama dan makin kuat kedudukan uleebalang di Aceh. Kedudukan yang kuat ini disebabkan oleh cara-cara dan tujuan uleebalang yang berbeda dengan ulama. Mereka peroleh semua itu dengan mengkhianati perjuangan masyarakatnya. Bila bukan karena pengkhianatan mereka kemungkinan Belanda untuk menguasai Aceh sangatlah jauh.

"Setelah pasukan - pasukan mendarat, memang ada beberapa pemuda rakyat yang rendah kedudukannya di daerah pantai datang menyerah. Di antara mereka itu ialah kepala daerah Meuraxa bernama Teuku Nek."¹⁴

¹⁴M. Nur Al Ibrahimy, Tgk. Daud Beueueh, Op.Cit, hal. 80 dan lihat Van 't Veer, Perang Aceh, hal. 107.

"Sewaktu Teuku Nek datang berdamai, Van Swieten tidak mengetahui bahwa di sini sedang terjadi permusuhan di antara para uleebalang dalam mukim yang berbatasan."¹⁵

Bahkan Van 'T Veer menandakan lebih jelas lagi tentang Teuku Nek di tengah-tengah kaum kolonialis Belanda di Aceh, begitu juga Snouck Horgronje.

" bahwa Teuku Nek yang sedari semula adalah saka guru pemerintah Belanda yang amat besar, tak lain adalah seorang penghisap dan pemeras yang sangat ulung di antara para uleebalang."¹⁶

Setelah Belanda benar-benar menguasai Aceh, para uleebalang itu selain tetap posisinya sebagai raja-raja daerah yang otonom, juga menerima gaji dari pemerintah Belanda.

Pengkhianatan para uleebalang ini dapat dilihat pada suatu ikrar yang dilakukan para uleebalang untuk setia kepada Belanda.

Ikrar ini dikenal dengan Korte Verklaring. (Lihat lampiran IV).

Sebaliknya, ulama suatu figur yang tidak bisa menerima kehadiran kolonial Belanda di Aceh, mereka tersingkir dari pemerintahan, bahkan jika perlu⁸ disingkir-

15 Ibid, hal. 81 dan lihat Van 'T Verr, hal. 109.

16 Ibid.

kan secara menyeluruh oleh Belanda dari wilayah Aceh. Sikap seperti ini terlihat dari nasehat Snouck Horgronje terhadap pemerintah Belanda di Aceh mengenai ulama.

"Jangan mencoba-coba mengadakan perundingan dengan musuh yang aktif, terutama jika mereka terdiri dari ulama, Sebab keyakinan mereka yang menyuruh mereka melawan ..."¹⁷

Tersingkirnya ulama yang kedua terjadi setelah rezim Jepang mengadakan perubahan struktur pemerintahan setelah beberapa bulan berada di Aceh. Pada dasarnya, kedatangan Jepang ke Aceh atas undangan ulama, setelah diadakan perjanjian diantara keduanya, yaitu keberadaan Jepang di Aceh hanyalah membantu mengusir Belanda dan membantu masyarakat Aceh untuk merdeka. (lihat bab II, halaman 20).

Pertama kali ulama masih mendapat posisi yang baik dalam pemerintahan baru Jepang. Bila di Jawa Jepang mendirikan suatu jawatan urusan agama, maka lain halnya di Aceh, Jepang tidak ikut campur dalam urusan agama. Perbedaan yang menyolok ini mencerminkan politik yang bersifat kolonial dan eksploitasi yang sejak semula sudah diperkirakan dan dipertimbanglan untuk Sumatra dan Malaya, berbeda dengan kebijaksanaan pendekatan terhadap kekuatan-kekuatan rakyat di Jawa.

¹⁷ Drs. Ismuha, Ulama Aceh Dalam Perspektif Sejarah, Op.Cit, hal. 56.

Setelah enam bulan Jepang datang ke Aceh, dikejutkan oleh sebagian ulama. Mereka yang dahulu pernah bersama-sama Jepang mengusir Belanda kini justru hendak mengadakan konfrontasi berdasah dengan Jepang. Hal seperti ini tidak diperhitungkan sebelumnya oleh Jepang. Mereka tidak mengetahui kepekaan-kepekaan yang terlalu kuat dengan agama di kalangan masyarakat Aceh,

Walaupun Jepang tidak mengurus secara langsung masalah-masalah agama, tetapi tingkah laku serdadu - serdadu Jepang telah menyinggung perasaan masyarakat Aceh.

"Sikap serdadu-serdadu Jepang selama di Aceh dipandang tidak tahu adat, kurang ajar. Masyarakat Aceh yang kuat agamanya tidak dapat melihat serdadu Jepang mandi telanjang tempat-tempat umum, bahkan masyarakat Aceh mensifatinya dengan monyet."¹⁸

Inilah yang menyebabkan ulama bersama masyarakat Aceh anti pati terhadap Jepang.

Setelah terjadi konfrontasi berdasah antara masyarakat yang dikoordinir oleh sebagian ulama terhadap Jepang maka berubahlah sikap terhadap ulama, dan beralih kepada tokoh yang lain, yaitu uleebalang. Sejak itu, ulama tersingkir yang kedua kalinya di dalam sejarah pemerintahan Aceh.

Tersingkirnya Ulama dari pemerintahan kolonial Belanda di Aceh ini bukan berarti tersingkir dari masyarakat-

¹⁸ Henka, Kenang-kenangan Hidup, Op.Cit, hal. 205. Lihat peristiwa berdarah ini secara mendetail pada buku Antony Reid, hal. 187-190, dan buku Muh. Ibrahim, tentang Perang Bayu, hal. 168 - 172, dan Perang Padrah, hal. 172 - 174.

nya. Justru mendekatkan mereka kepada masyarakat dan menyebabkan mereka berhadapan langsung dengan musuh -musuhnya, baik Belanda dan kaum feodal dari bangsanya.

Tersingkirnya ulama, memberikan peluang kepada uleebalang untuk mempraktekkan kembali kefeodalisnya. Hal ini makin membangkitkan rasa benci masyarakat terhadap mereka.

Kedadaan seperti di atas merupakan faktor yang dominan yang dapat mengantar Aceh kepada Revolusi Sosial.

b. Faktor Ekstern

1. Pengaruh Dari Timur

Sikap dari reaksi masyarakat Aceh terhadap penjajahan tidak dapat dilepaskan dari agama yang mereka anut, yaitu agama Islam.

Aceh yang dikatakan "Serambi Mekkah" karena alasan historis yang berhubungan dengan agama Islam yang datang langsung dari Mekkah, tempat asal agama tersebut tumbuh. Tempat tersebut mempunyai pengaruh yang besar terhadap masyarakat Aceh.

Pengaruh itu masuk ke Aceh melalui dua cara. Pertama, melalui cerita atau buku-buku hikayat yang menceritakan kepahlawanan para sahabat di kota Mekkah dan sekitarnya. Kedua, melalui ceramah-ceramah para ulama yang pernah belajar di Mekkah atau di negara-negara timur (Islam).

Cara yang pertama, yaitu melalui buku-buku hikayat telah terbukti secara nyata keberhasilannya di dalam sejarah Aceh, dalam rangka memberikan stimulan masyarakat untuk berjihad fi sabilillah melawan penjajah. Keterangan tentang cara ini dapat dilihat pada bab III, yang membahas peranan Hikayat Prang Sabi di dalam menggerakkan masyarakat melawan Belanda. Bahkan buku Hikayat Prang Sabi ini ditulis oleh pengarangnya, Teungku Pante Pulu, sewaktu beliau masih berada di kota suci Mekkah.

Perlu ditambahkan di sini, bahwa pengaruh dari buku-buku hikayat tersebut, khususnya Hikayat Prang Sabi, masih besar pada masyarakat Aceh hingga terjadinya Revolusi Sosial.

Cara yang kedua, yaitu melalui ceramah-ceramah atau khutbah-khutbah yang dilontarkan oleh ulama-ulama yang pernah belajar di Mekkah atau negara-negara Timur, seperti Mesir atau lainnya. Pengaruh dari cara kedua ini masuk melalui pendidikan formil di Aceh.

"Untuk mengajarkan pengetahuan yang tidak begitu tradisional mereka memakai beberapa orang muda yang mendapat pendidikan pada perguruan-perguruan Islam yang modern di Sumatra Barat pada tahun 1920-an dan juga guru-guru yang pernah menuntut ilmu di Jawa, di Mesir maupun Mekkah".¹⁹

¹⁹ Anthony Reid, Perjuangan Rakyat, Revolusi Dan Hancurnya Kerajaan di Sumatra, Op.cit, hal. 55. Fan Lihat Drs. Ismuha, Ulama Aceh Dalam Perspektif Sejarah, hal.22-24.

Apalagi pada tahun 1920-an negara-negara timur, seperti Mesir dan Makkah dalam suasana politik yang tidak berbeda dengan suasana politik di Aceh, dan juga pembaharuan pemikiran di negara-negara tersebut mengalami pembaharuan sangat pesat.

Pengaruh dari timur ini tidak kalah pentingnya dengan faktor pendukung lainnya yang dapat mengantar Aceh ke Revolusi Sosial.

ii. Pengaruh Dari Barat

Penjajahan di Aceh sudah dapat dipastikan membawa dampak negatif dalam sektor perekonomian masyarakat. Kemudian dari sektor ini menjalar ke sektor-sektor lainnya.

Walaupun dampak negatif dari penjajahan lebih besar, tetapi masih mempunyai pengaruh yang positif. Pengaruh yang positif tersebut dapat dilihat pada perubahan sistem, sarana dan pengembangan materi pendidikan yang masih terbatas.

Pembahasan tentang perkembangan dalam sektor pendidikan ini telah dibahas pada bab II, halaman 40 yang telah menerangkan tentang perubahan sarana pendidikan dari dayah-dayah yang tradisional kepada dayah-dayah yang modern atau sekolah-sekolah (madrasah) yang menggunakan bangku dan papan tulis. Selain itu, juga adanya penambahan materi yang disesuaikan dengan peraturan pemerintah kolonial.

Perubahan-perubahan tersebut sebenarnya merupakan reaksi dari kebijaksanaan pemerintah kolonial untuk mendirikan sekolah-sekolah tandingan bagi dayah-dayah yang di Aceh. Walaupun perubahan sistem, sarana dan penambahan materi yang disesuaikan itu pada awalnya mendapat reaksi dari beberapa ulama-ulama yang berhaluan keras, tetapi pada akhirnya diterima juga oleh mereka.

Perubahan-perubahan ini sudah jelas merupakan pengaruh dari sekolah tandingan yang dibuat oleh Belanda (Barat). Tetapi selama sekolah-sekolah yang mengalami perubahan itu dikelola oleh ulama, seperti Tgk. Daud Beureueh, M. Nur Al Ibrahimy dan kawan-kawan mereka yang sehaluan, tidak akan menurunkan mutu agama sebagaimana yang diajarkan di dayah-dayah sahulu.

Anthony Reid, dalam hal ini menjelaskan sebagai berikut :

"... menjelang tahun 1920, gaya pendidikan dayah, suatu tingkat agama yang agak tinggi di Aceh telah mendapat saingan dari Volksschool di satu fihak dan di fihak lain oleh konsep-konsep baru pendidikan dan pengorganisasian yang dibawa oleh Muhammadiyah dan lainnya. Beberapa ulama yang terkenal dengan penuh semangat telah menjawab tantangan ini dengan mendirikan sekolah-sekolah dengan rencana pelajaran yang lebih luas dan dengan cara-cara yang modern."²⁰

20 Ibid, hal. 54 - 55.

Di antara sarana-sarana pendidikan Islam yang sudah dimodenisir ialah :

1. Perguruan Islam, di bawah pimpinan Teungku Abdul Wahhab di Seulimeum, pada tahun 1926.
2. Madrasah ahlus Sunnah wal Jama'ah, di bawah pimpinan Said Husin, di Idi, pada tahun 1928.
3. Al Islam Peusangan, dekat Bireuen, di bawah pimpinan Teungku Abdur Rahman, pada tahun 1930.
4. Jam'iyatul Diniyah Al Mutsalah, di bawah pimpinan Teungku Syaikh Ibrahim, di Montasik, pada tahun 1931.
5. Dan lain-lain dari sekolah-sekolah/madrasah-madrasah oleh FUSA dan Muhammadiyah.²¹

Dengan perubahan-perubahan di sektor pendidikan yang dapat pengaruh dari Barat, masyarakat mulai mengetahui cara-cara berorganisasi, menggunakan mass media sebagai alat da'wah maupun propaganda politis dan lainnya.

Selain itu, adanya suatu kemungkinan besar, bahwa berdirinya FUSA sebagai organisasi yang besar dan terorganisir secara baik karena dikelola oleh ulama-ulama dari sekolah-sekolah yang demikian.

iii. Hubungan Dengan Malaya

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya tentang kedatangan Jepang di Aceh, maka kedatangan di

²¹ Ibid, halaman 23.

Aceh ini merupakan hasil dari keputusan rapat yang diadakan di rumah Teuku Nyak Arif, yang dihadiri oleh sebagian besar ulama, di antaranya Teungku Daud Beureuch dan Teungku Abdul Wahab, yang keduanya dari FUSA. Hasil dari rapat itu, ialah mengadakan hubungan luar negeri (Jepang di Malaya) guna mendapat bantuan untuk mengusir Belanda. Rapat tersebut ditutup dengan pengucapan ikrar bersama, yaitu untuk setia kepada Islam, bangsa dan tanah air, serta menyusun pemberontakan bersama antara ulama dan sebagian uleebalang yang masih setia kepada rakyat untuk mengusir Belanda. Rapat ini diadakan pada bulan Desember 1941.

Selain mereka berikrar berjuang melawan Belanda dari dalam, juga secara aktif mereka mengadakan hubungan dengan Belanda di Malaya, guna mengadakan kerja sama melawan Belanda.²²

Hubungan antara Aceh dan Jepang di Malaya sampai kepada perjanjian untuk mendatangkan Jepang ke Aceh. Kedatangan Jepang di Aceh telah dijadwalkan secara rapi, dan Jepang datang sebagaimana yang diharapkan dan dijadwalkan oleh kedua pihak.

22, Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Istimewa Aceh, DP & K, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Jakarta, Tahun 1983, hal. 13.

Kedatangan Jepang memang dapat mempermudah mengusir Belanda dari Aceh, tetapi setelah Jepang dapat mengusir Belanda dengan bantuan patriot-patriot Aceh, justru mereka berkuasa dan menjajah Aceh lebih kejam dari pada Belanda. Sangat disayangkan dalam hal ini para ulama yang mengadakan persetujuan dengan Jepang tidak menyadarinya.

Pengalaman kerja sama dengan Jepang di Malaya ini menjadikan pada ulama kembali kepada khittah awalnya, yang non kompromi dengan bangsa lain yang tidak sefaham dengan mereka, di dalam memerdekakan masyarakatnya dari penindasan kolonial dan kaum feodal dari bangsanya sendiri.

Selain itu, konferensi Islam yang diadakan di Singapura (Malaya), yang dihadiri oleh Daud Beureueh (PUSA) sebagai wakil dari Aceh dan Buya Hamka (Muhammad diyah) sebagai wakil dari Sumatra Timur dan ulama-ulama lainnya, dijadikan oleh mereka suatu kesempatan untuk tukar pandangan di dalam melawan Jepang di daerahnya masing-masing.

Walaupun Jepang sebagai pelaksana konferensi bertujuan untuk memeralat mereka untuk propaganda-propaganda kolonialnya. Hal ini disadari betul oleh para ulama, tetapi kesempatan ini oleh mereka digunakan

semaksimal mungkin untuk antara ulama dan pemimpin lainnya. Konferensi ini banyak dihadiri oleh peserta dari Sumatra Timur dan Aceh.

"Puncak kebijaksanaan memeralat ulama - ulama terkemuka untuk tujuan-tujuan propaganda Jepang adalah Konferensi Islam di Singapura pada tanggal 5 - 6 april. Dari seluruh delegasi yang datang dari Sumatra dan Malaya, yang terbanyak dari Sumatra Timur dan Aceh".²³

B. Sebab Khusus

Setelah dijelaskan sebab umum terjadi Revolusi Sosial di Aceh, maka perlu dijabarkan lebih lanjut sebab khusus hingga terjadinya Revolusi Sosial di Aceh. Sebab khusus terjadinya Revolusi Sosial di Aceh pada tahun 1946 ialah Peristiwa Cumbok.

Peristiwa Cumbok

Pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kalah tanpa syarat kepada sekutu. Di saat mereka menyerah kalah, bangsa Indonesia menggunakan kesempatan yang baik itu untuk memproklamasikan kemerdekaannya.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 naskah proklamasi Kemerdekaan dibacakan atas nama seluruh bangsa Indonesia

²³ Anthony Reid, Perjuangan Rakyat, Revolusi dan Hancurnya Kerajaan di Sumatra, Op.cit, hal.189. Lihat Hamka, Kenang-kenangan Hidup, hal.213-216.

oleh Soekarno-Hatta di ibu kota Jakarta. Tetapi berita pembacaan naskah proklamasi itu tidak terbesat luas ke seantero Nusantara, termasuk wilayah Aceh. Maka tidak mengherankan bila pada tanggal itu masyarakat Aceh masih tidak mengetahui proklamasi kemerdekaan tersebut.

Tidak sampainya berita pembacaan naskah Proklamasi Kemerdekaan itu disebabkan oleh ulah pemerintah Jepang di Aceh. Beberapa bulan, sebelum Jepang menyerah kepada sekutu, mereka menyita radio-radio milik penduduk agar mereka tuli akan perkembangan di Pusat (Jakarta). Bahkan Domei, Kantor Berita Jepang di Aceh, diambil alih secara langsung oleh Jepang sendiri. Semua pegawai bangsa Indonesia yang bekerja di kantor berita tersebut dibebaskan tugasnya, karena khawatir bila kekalahan Jepang dan pembacaan naskah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia terdengar oleh masyarakat Aceh.

Meskipun Jepang menyembunyikan berita Kemerdekaan Indonesia namun pada akhirnya masyarakat Aceh mengetahuinya. Berita resmi tentang Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia baru diketahui oleh masyarakat Aceh setelah kembalinya Mr. T.M. Hasan dan Dr. M. Amir sebagai wakil pemerintah R.I. untuk pulau Sumatra, dari Jakarta. Keduanya mendapat perintah dari presiden RI. merealisasikan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Sumatra.²⁴

²⁴ Muhammad Ibrahim, Sejarah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh, BAP3K, 1977/78, hal.177

"Pada tanggal 29 Agustus 1945, setelah datangnya T.M. Hasan inilah dengan cepat Proklamasi Kemerdekaan RI. tersebar luas ke seluruh Sumatra, termasuk ke Daerah Aceh." 25

Sejak terdengarnya berita kemerdekaan Republik Indonesia di Aceh, para pemuda, yang baru dua hari membuat hari bersejarahnya di suatu ruang Sentral Hotel Kutaraja dengan membentuk API (Angkatan Pemuda Indonesia) berusaha sekuat tenaga untuk menyebarkan berita proklamasi Kemerdekaan RI. tersebut kepada seluruh masyarakat Aceh.

Angkatan Pemuda Indonesia itu bermarkas di Kutaraja dengan susunan Pimpinan sebagai berikut :

Komandan	: Syamaun Gaharu.
Kepala Staf	: T.A. Hamid Anwar.
Sekretaris	: Husein Yusuf.
Anggota	: Nyak Deh Rica, Said Usman, Said Ali, T.M. Samalanga, T. Sarung Bahktiar Idham, T. Abdullah, Saiman. ²⁶

25 Ibid.

26 Lihat...., Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Istimewa Aceh, hal. 68 - 69. Dan lihat Muhammad Ibrahim, Sejarah Daerah Istimewa Aceh, hal. 178.

Bersamaan dengan lahirnya API, lahir pula kelasy karan-kelasykaran yang dipelopori oleh pemuda. Di antaranya :

1. Pemuda Rakyat Indonesia (PRI), yang setelah tahun 1947 diintergrasi ke dalam Divisi Rencong, dengan pimpinan umum Ali Hasyemi.
2. Barisan Mujahidin, yang dalam perkembangannya dimasukkan ke dalam Divisi X/Tgk. Chick Di Tiro, di bawah pimpinan Tgk. Daud Beureueh.
3. Dan masih banyak lagi.²⁷

Organisasi-organisasi inilah yang vanyak membantu mengadakan perlawanan-perlawanan terhadap Jepang dan lainnya yang menghambat keinginan masyarakat Aceh untuk merdeka, sehingga menimbulkan berbagai peristiwa. Di antaranya :

1. Peristiwa Seulimeum, pada tanggal 26 Nopember 1945.
2. Peristiwa Lhok Ngan dan Blang Bintang, pada tanggal 1 - 7 Desember 1945.
3. Peristiwa Bereun, pada tanggal 18 Nopember - 1945. Pada peristiwa Bereun ini Jepang menye-

²⁷ Muhammad Ibrahim, Sejarah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Op.cit, hal.178.

- rahkan 320 pucuk senjata tanpa ada perlawanan.
4. Peristiwa Sigli, pada tanggal 22 Desember 1945.
 5. Peristiwa-peristiwa di Aceh Utara (Krung Panjoe), Aceh Timur (Bukit Metua dan Kampung Upak), dan Aceh Barat (Suak Timah, Peureumbeue dan Teunom). Semua peristiwa ini terjadi antara tanggal 20 - 29 Nopember 1945.²⁸

Dari perlawanan - perlawanan terhadap Jepang itu mereka berhasil merampas sebagian persenjataan milik Jepang. Maka dengan bermodalkan sebagian kecil senjata hasil rampasan dari tentara Jepang dan semangat patriotisme yang tinggi dapat mendorong mereka untuk mempertahankan kemerdekaan RI dari segala usaha yang merongrongnya. Apalagi berita tentang adanya usaha beberapa uleebalang pro Belanda yang hendak memperlicin datangnya kembali Belanda ke Aceh.

Usaha Belanda untuk datang kembali ke Aceh memang memberikan harapan baru kepada uleebalang yang dahulunya pro Belanda. Bahkan karena adanya usaha uleebalang untuk mendatangkan kembali Belanda ke Aceh se-

28 Ibid, hal 178 -179

hingga mereka dianggap sebagai pengkhianat, baik oleh masyarakat maupun pemerintah Daerah. Karena usaha tersebut maka dapat melahirkan suatu peristiwa berdarah yang dikenal dengan peristiwa Cumbok.

"Pemerintah Daerah pada tanggal 8 Januari 1946 dalam maklumatnya mengeluarkan pernyataan bahwa kaum uleebalang yang berpusat di Cumbok dan tempat-tempat lain, yang mengangkat senjata mengadakan perlawanan terhadap rakyat umum, dinyatakan sebagai pengkhianat dan musuh Negara Republik Indonesia".²⁹

Untuk memahami peristiwa Cumbok secara Jelas, terlebih dahulu diterangkan disini beberapa kejadian yang mengawalinya secara singkat.

Kejadian yang pertama, yaitu rapat uleebalang di rumah T. Keumangan Umar, di Beureunum. Dan kejadian yang kedua, yaitu peristiwa Sugli. Kedua peristiwa ini adalah prolog peristiwa Cumbok.

Pada bulan oktober 1945, pertentangan antara kaum ulama dan uleebalang sudah memasuki keadaan yang gawat, berhubungan dengan tindakan-tindakan para uleebalang, yang dipolopori oleh T. Daud Cumbok terhadap

²⁹ Mr. S.M. Amin. Kenang-kenangan masa Lampau, Pradya Paramita, Jakarta, 1978, hal.13.

para pemimpin PUSA, pemudanya dan PRI yang pada waktu itu sedang giat-giatnya menggelorakan semangat perjuangan kemerdekaan Indonesia di Pidie.

Karena rasa kuatir para uleebalang terhadap kepemimpinan para ulama di Aceh setelah kalahnya Jepang, maka mereka pada tanggal 22 oktober 1945 mengadakan rapat di rumah di rumah uleebalang Keumangan T. Keumangan Umar di Beureuneum.

Dalam rapat tersebut dibicarakan kepemimpinan mereka di tengah-tengah masyarakat Aceh yang sedang terancam hancur oleh kepemimpinan para ulama. Dalam-rapat tersebut menghasilkan suatu keputusan sebagai berikut :

1. Membentuk suatu kesatuan yang bertugas mempertahankan kedudukan uleebalang di Lam Meulo.
2. Membentuk barisan keamanan dengan dipersenjatai secara lengkap, agar dapat lebih efektif dalam bertindak, yang dikenal dengan BPK (Barisan Penjaga Keamanan).³⁰

Barisan Penjaga Keamanan ini dipimpin langsung oleh T. Daud Cumbok. Barisan ini dibagi menjadi tiga

³⁰ M. Nur Al Ibrahimy, Tgk. Muhammad Daud Beureueh, Op.cit, hal. 92.

bagian, dan setiap bagian mempunyai fungsi masing-masing. Sedang selaku ketua markas besar uleebalang di Lam Meuloh diangkat saudaranya sendiri, T. Mahmoud.³¹

Ketiga bagian dari Belanda Penjaga Keamanan (BPK) tersebut ialah :

1. Barisan Cap Bintang, bertugas menghadapi perlawanan rakyat yang menentang kekuasaan uleebalang.
2. Barisan cap sauh, bertugas di bidang usaha keuangan untuk membiayai gerakan mereka.
3. Barisan cap Tumbak, bertugas menangkap para pemimpin rakyat yang menentang atau menghalang-halangi gerakan mereka.³²

Barisan Penjaga Keamanan (BPK) ini dipersenjatai dengan senjata-senjata yang diperoleh dari dua jalur. Pertama, dari jalur perampasan dari Jepang, dan kedua, mengirim utusan ke Belanda yang berada di Medan untuk meminta bantuan. Tentang jalur kedua ini M. Nur Al Ibrahimy dalam bukunya 'Tgk. Muhammad Daud Beureueh' mengatakan :

"Untuk mencapai maksud ini (memperoleh senjata)

³² Muhammad Ibrahim, Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Op.Cit, hal.90

pertama-tama uleebalang mengirim lebih banyak utusan kepada Belanda di Medan untuk meminta bantuan".³³

Maka tidak mengherankan bila senjata-senjata yang banyak itu diperoleh oleh para uleebalang dalam waktu singkat.

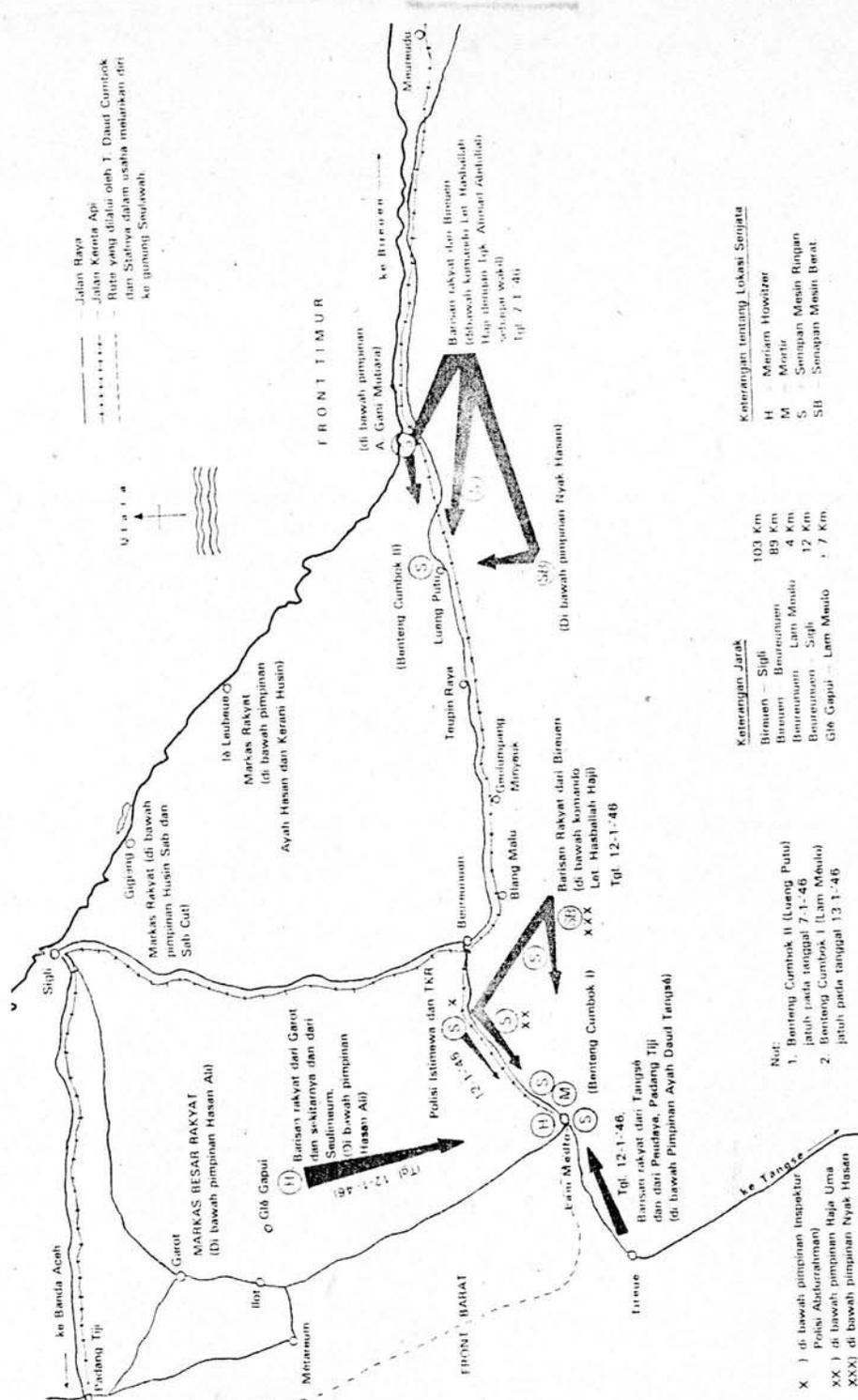
"Dalam waktu singkat saja Badan Keamanan Rakyat ini telah terbentuk dan telah mempunyai persenjataan yang cukup sempurna dari pada persenjataan tentara pemerintahan sendiri, TKR, atau Tentara Keamanan Rakyat".³⁴

Adapun menurut Anthony Reid dalam bukunya 'Perjuangan Rakyat' halaman 196, menerangkan bahwa para uleebalang mempunyai 100 pucuk senjata termasuk meriam dan mortir. Barisan Keamanan Rakyat ini terdiri dari bekas anggota KNIL yang sudah terlatih menggunakan persenjataan itu.

Setelah itu, para uleebalang mulai menjalankan rencananya. Setiap barisan menjalankan fungsinya ma-

³³ M. Nur Al Ibrahimy, Tgk. Muhammad Daud Beureuh, Op.Cit, hal. 100.

³⁴ Ibid, hal. 93.



Jalan Raya
 Jalan Kereta Api
 Rute yang dilalui oleh T. Daud Cuntok dan Stafnya dalam usaha melarikan diri ke gunung Singaweh.

0 1000

Keterangan tentang Lokasi Senjata

- H - Marish Hoozitar
- M - Mrotir
- S - Gemapan Meala Ringan
- SB - Serapan Meala Berat

Keterangan Jarak

- Bireuen - Sigli 103 Km
- Bireuen - Bireuen 89 Km
- Bireuen - Lam Meala 4 Km
- Bireuen - Sigli 12 Km
- Gib Gapul - Lam Meala 7 Km

Ret:
 1. Benteng Cumbok II (Lueng Puluh) jatuh pada tanggal 7-1-46
 2. Benteng Cumbok I (Lam Meala) jatuh pada tanggal 13-1-46

- X) di bawah pimpinan Inspektur Polisi Aburrahman
- XX) di bawah pimpinan Haja Uma
- XXX) di bawah pimpinan Nyak Hasan

sing-masing. Tindakan-tindakan mereka di dalam menjalankan rencana sangat mendapat sorotan dari pemerintah daerah Aceh, karena menggunakan cara pemerasan, penculikan, bahkan pembakaran rumah-rumah masyarakat yang anti terhadap mereka.

Dalam keadaan seperti ini pemerintah daerah Aceh menghimbau kepada uleebalang yang memberontak untuk menahan diri agar tidak timbul showdown (adu kekuatan) antara masyarakat Aceh, dan menyebabkan kelemahan di dalam menghadapi pendaratan Belanda yang kedua kalinya di Aceh.

"Pemerintah daerah di Kutaraja melihat kenyataan ini, berusaha dengan segenap tenaga menyelesaikan persengketaan itu dengan damai. Tuanku Mahmud, sebagai wakil residen Aceh, mengirim orangnya untuk Markas Besar di Lam Meulo, akan tetapi usaha untuk menyelesaikan persengketaan itu secara damai tidak berhasil. Orang yang dikirim ke Markas Besar uleebalang di Lam Meulo malah diperlakukan secara tidak wajar. Markas Besar uleebalang ini rupa-rupanya merasa cukup kuat untuk menghadapi segala sesuatu yang mungkin terjadi. Tentara mereka 'Badan Penjaga Keamanan' terus menerus dilatih, dan pada tanggal 25 oktober 1945, Badan Penjaga Keamanan ini diperintahkan untuk melakukan penangkapan dan penahanan atas beberapa pemuda yang ditugaskan oleh pemerintah daerah untuk

menjaga kantor pos dan kantor telepon di Lam Meulo.

..... dan pada malam 8 Nopember 1945, atas perintah Markas Besar uleebalang dilakukan perampasan dan penguasaan rumah pertemuan pemuda-pemuda di Lam Meulo, Seeterusnya di lakukan pembersihan kota Lam Meulo dari anggota - anggota dan pemuka-pemuka organisasi perjuangan dan dengan demikian dapatlah kiranya dianggap bahwa Markas Besar uleebalang telah berhasil menghancurkan gerakan lawannya di wilayah Lam Meulo ini dan daerah ini telah dapat dianggap suatu wilayah yang mereka kuasai secara sempurna".³⁵

Dari keterangan di atas telah jelas bahwa para uleebalang telah menguasai Lam Meulo, dan dari daerah tersebut para uleebalang melebarkan sayapnya. Daerah kedua yang hendak dikuasainya, yaitu kota Sigli.

Kota Sigli termasuk ibu kota di daerah Piddie. Daerah Piddie ini merupakan pusat dua kekuatan yang selalu bersaing, yaitu kekuatan pengaruh ulama dan uleebalang.

Pada bulan nopember, suhu politik di daerah tersebut memuncak. Memuncaknya suhu politik tersebut disebabkan oleh ulah T. Daud Cumbok beserta kawan-kawa-

³⁵ Mr. AM. Amin, Kenang-kenangan Masa Lampau, Op.Cit, hal.132.

wannya yang menghendaki agar senjata Jepang yang masih berada di Sigli harus jatuh ke tangan mereka. Kehendak yang dipaksa-pasakan ini sudah dapat dipastikan tidak dapat diterima oleh para ulama atau tokoh-tokoh lainnya yang pro-republiken di Sigli.

Kala tuntutan para uleebalang itu dilontarkan, Jepang masih belum menyerahkan senjata-senjata mereka kepada masyarakat Sigli atau kepada tokoh-tokoh mereka. Di sisi lain, memang Jepang menjanjikan kepada RI yang didominasi oleh PUSA. Tetapi janji itu belum ditepati oleh Jepang karena adanya intruksi dari Lino, bekas gubernur di Aceh, kepada Muramoto, seorang pembesar Jepang yang masih berada di Sigli.

"Oleh karena adanya intruksi dari Lino, bahwa pertentangan antara kaum ulama dan uleebalang harus lebih dipertajam sebagai suatu usaha mengalihkan perhatian dan tekanan orang-orang Aceh atas tentara Jepang yang dikonsentrasikan di Banda Aceh menunggu pemberangkatannya ke Jepang".³⁶

Atas dasar instruksi Lino ini, Muramoto ditugaskan untuk membuat kalkulasi bahwa perimbangan kekuatan (balance of power) antara dua golongan yang bersaing

³⁶ M. Nur Al Ibrahimy, Tgk. M. Daud Beureuh, Op Cit, hal. 96.

itu harus dipelihara.

Menurut kalkulasi Muramoto, pada bulan nopember kekuatan uleebalang mulai melemah. Oleh karena itu ia ditugaskan untuk menyerahkan senjata kepada uleebalang agar terjaga keseimbangan antara keduanya.

"Oleh karena kekuatan uleebalang menurut kalkulasi Muramoto pada bulan nopember agak lemah, maka Muramoto secara rahasia menyerahkan seluruh senjata kepada T. Tjut Hasan, Gunco Sigli dengan perkiraan bahwa senjata-senjata itu nantinya akan dipergunakan oleh uleebalang juga".³⁷

Ternyata dugaan Jepang benar, kira-kira 200 orang bersenjata lengkap dari pengikut uleebalang Pié di yang dipimpin oleh T. Pakeh Sulaiman secara diam-diam pada malam hari berhasil memasuki Sigli, dan langsung membuat kubu pertahanan di rumah T. Tjut Hasan, Conco Sigli. Senjata-senjata yang diserahkan kepada T. Tjut Hasan diserahkan kepada pengikut uleebalang agar dipergunakan oleh mereka untuk beraksi di Sigli.

Suasana pada pertengahan malam antara tanggal 31 - 11 dan 12 - 1945 lebih jelasnya perhatikan ke-

³⁷ Anthony Reid, Perjuangan Rakyat, Revolusi dan Hanjurnya Kerajaan di Sumatra, *Op.cit*, hal. 198.

T. Nyak Arif, Residen Aceh pertama. Beliau gagal dalam usahanya mencegah meletusnya Perang Cumbok, bahkan beliau sendiri didaulat oleh TPR (1946).



T. Panglima Polem Mohd. Ali, Wakil Residen Aceh pertama. Beliau lah yang menandatangani ultimatum terhadap kaum Cumbok bersama Sjamaun Gaharu, Kepala Markas Umum Daerah Aceh merangkap Panglima TKR (1946).

ketarangan Mr. SM. Amin, halaman 134.

"Suasana semakin lama semakin tegang. Pada suatu malam di permulaan bulan Desember 1945, kira-kira jam 12, sejumlah besar penduduk kampung-kampung di lingkungan kota Sigli, pengikut-pengikut Partij Uleebalang lengkap bersenjata pedang, rencong, parang dan beberapa pucuk bedil memasuki kota Sigli dan mengambil persiapan-persiapan untuk menguasai kota ini dengan menempatkan pengawal-pengawal di tempat strategis, serta mengadakan pengawasan atas lalu-lintas. Atas setiap orang yang memasuki dan meninggalkan kota Sigli dilakukan pemeriksaan yang cermat dan bukan sedikit penangkapan penangkapan yang dilakukan".³⁸

Suasana yang makin tegang dan gawat ini sengaja dibuat oleh Jepang yang menghendaki keadaan demikian terjadi di Sigli. Sebab keadaan yang seimbang di antara keduanya bisa menimbulkan konfrontasi yang berkepanjangan, dan keadaan demikian dapat memperlemah perlawanan masyarakat Aceh terhadap Jepang yang masih berada di Aceh.

Karena tindakan-tindakan uleebalang sudah melampaui batas dan tidak dapat ditolerir, maka pemimpin-pemimpin PRI, Hasan Ali dan Husin Sab mengerahkan peng-

38 Ibid.

ikutnya dari Garot dan Gigieng untuk mengepung Sigli sehingga para pengikut uleebalang benar-benar terkepung.³⁹

Dalam keadaan yang kritis ini T. Nyak Arif, Residen Aceh, bertindak dengan tepat dan pada waktu yang sangat membutuhkan tindakan tersebut, yaitu mengirim Syamaun Gaharu dengan satu pasukan kecil untuk merundingkan masalah senjata-senjata Jepang di Sigli. Kemudian terjadilah persepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dan Jepang tentang penyelesaian persenjataan tersebut yang menyebabkan makin berkorbarnya pertikaian antara pengikut ulama dan uleebalang di Sigli. (lihat lampiran V, tentang surat perjanjian antara Pemerintah Daerah dan Jepang).

Sebelum surat perjanjian itu ditanda - tangani, pada pukul 3 siang, Syamaun Gaharu menemui pemimpin PRI, yang didominir oleh PUSA itu, yang berada di tengah banjirnya umat berkumpul di luar kota Sigli. Mereka menyetujui dengan langkah yang akan diambil oleh Pemerintah Daerah permasalahan ini dapat diselesaikan dengan damai.⁴⁰

³⁹ Ibid. Dan lihat Mr. TM. Amin, Kenang-kenangan Masa Lampau, hal.134

⁴⁰ Lihat M. Nur Al Ibrahim, Perjuangan Rakyat,

Uleebalang-uleebalang yang dipimpin oleh T. Daud Cumbok masih tidak puas dengan menyelesaikan yang di usahakan oleh Pemerintah Daerah terhadap peristiwa yang terjadi di Sigli ini. Dan mereka menganggap semua itu merupakan kegagalan yang besar buat kubu mereka.

Karena merasa tidak puas terhadap penyelesaian yang di usahakan oleh pemerintah Sigli, maka mereka berkumpul kembali di rumah T. Keumangan Umar untuk membicarakan tindakan lebih lanjut. Rapat/pertemuan itu diadakan tanggal 10 Desember, sembilan hari setelah peristiwa Sigli. Diputuskan dalam pertemuan itu untuk meminta bantuan senjata kepada Belanda di Medan. Dalam rapat itu juga disetujui pendapat T. Daud Cumbok bahwa dalam menghadapi ulama dan pengikutnya harus menggunakan tangan besi, tidak perlu cara-cara diplomatik.

Setelah bantuan diperoleh, mereka mengadakan aksi-aksi lebih kejam dari sebelumnya.

"....., mereka mengadakan suatu "machtvertoon" atau pertunjukan kekuatan. Secara besar-besaran mereka menfadakan "manouvere-manouvere" dan melepaskan tembakan-tembakan karaben, metra liur dan mortir kearah rumah-rumah dan kampung kampung. Pun keputusan untuk melakukan penangkapan dan pembunuhan-pembunuhan jika perlu di jalankan besar-besaran. Keganasan-keganasan

ini makin hari makin meningkat".⁴¹

Sikap Daud Cumbok, seperti yang digambarkan oleh Anthony Reid di atas memancing emosi semua rakyat dan para pemimpin Pro-Republik. Walaupun suasana sangat panas sekali di tengah-tengah masyarakat Aceh, Daud Cumbok tidak memperdulikannya. Bahkan Gubernur Sumatra Mr T. Hasan kala itu hendak berunding dengannya, ia tidak dapat mengabdikan permintaannya, tetapi Daud mengurus adiknya T. Mahmud, pertemuan itu pun tidak berhasil memperhatikan ambisi Cumbok beserta kawan-kawannya.

Aksi-aksi Cumbok sudah dianggap sangat membahayakan keamanan masyarakat, maka di Pidie sendiri Hasan Aly mengkoordinasi kegiatan kelompok pemuda Bersenjata dengan mendirikan Pusat Markas Barisan Pemuda Bersenjata pada tanggal 22 Desember di Garot. Begitu juga di Gigieng telah berdiri pasukan Husien Sab, dan pasukan Hasballah Daud yang bermarkas di Gle Gapui.⁴²

Cara kerja ketiga pasukan itu pertama-tama mengirim surat kepada Pemerintah Republik di Kutaraja dan

⁴¹ Anthony Reid, Perjuangan Rakyat, Revolusi dan Hancurnya Kerajaan di Sumatra, Op.Cit, hal.200.

⁴² Anthony Reid, Perjuangan Rakyat, Revolusi dan Hancurnya Kerajaan di Sumatra, hal.331-332.

surat diserahkan lewat Daud Beureuh yang menggambarkan tentang Daud Cumbok sebagai setan jahat dan musuh agama. Tujuan dari cara ini adalah untuk menekan kepada pemerintah dan PUSA untuk bertindak tegas kepada perusuh-perusuh tersebut.

Serangan pertama yang dilakukan oleh Markas Barisan Pemuda di Garot, terhadap kubu pertahanan Lam Meulo terjadi pada tanggal 25 Desember. Tetapi serangan pertama ini dapat dipukul mundur oleh uleebalang di Lam Meulo.

Pada tanggal 30 Desember 1945, para uleebalang mengadakan serangan balasan besar-besaran terhadap pusat-pusat PUSA/PRI di distrik Meteruem. Bahkan pasukan ini maju terus di sepanjang jalan ke Garot dan Sigli, dan dapat menundukkan perlawanan-perlawanan dari barisan pemuda di Meteruem. Selain itu, semua sekolah agama yang diduga membantu mensukseskan aspirasi PUSA dihancurkan, bahkan dibakar semua.⁴³

Pada waktu yang sama, datanglah pasukan anti Cumbok dari luar Pidie. menahan lajunya perjalanan pasukan Daud Cumbok. Selain itu, laju pasukan mereka

⁴³ Anthony Reid, Perjuangan Rakyat, Revolusi dan Hancurnya Kerjaan di Sumatra, hal.334 - 336.

juga tertahan untuk menuju Garot, pada awal bulan Januari 1946. Pada waktu yang sama pula, datanglah pasukan berani mati, Barisan Mati-dari Tangse dan pasukan dari Peudaya, di bawah pimpinan Djuned Effendi. Disamping itu datang pula sejumlah besar Mujahidin yang sejak bulan Januari membanjiri Sigli dan Garot.

Untuk pasukan yang terakhir ini, bergerak setelah mendapat pemerintah langsung dari Daud Beureuh terhadap M. Nur Al Ibrahimy, Direktur sekolah Normal Islam dan Teungku Abdul Wahhab, pemimpin semua pasukan pasukan Muslai bersenjata di Sumatra.

"....., tetapi koordinasi yang lebih sempurna baru terwujud dengan tibanya Teungku Abdul Wahhab (Seulimeum) pada minggu ketiga Desember dari konferensi Majelis Islam Tinggi di Bukit Tinggi dimana dia telah diangkat menjadi pemimpin tertinggi semua pasukan-pasukan kaum muslimin di Sumatra, Sabillah. Baru setelah menerima perintah-perintah Daud Beureuh pada akhir Desember, Abdul Wahhab dan M. Nur Al Ibrahimy bergerak menghadapi kekuatan uleebalang di Pidie".⁴⁴

Kemudian pada tanggal 6 Januari diadakan rapat di Samalangga. Dalam rapat ini, diangkat Hasballah Trieng Gadding, bekas Letnan Giyugun. Sebagai perang -

44 Ibid, hal.335

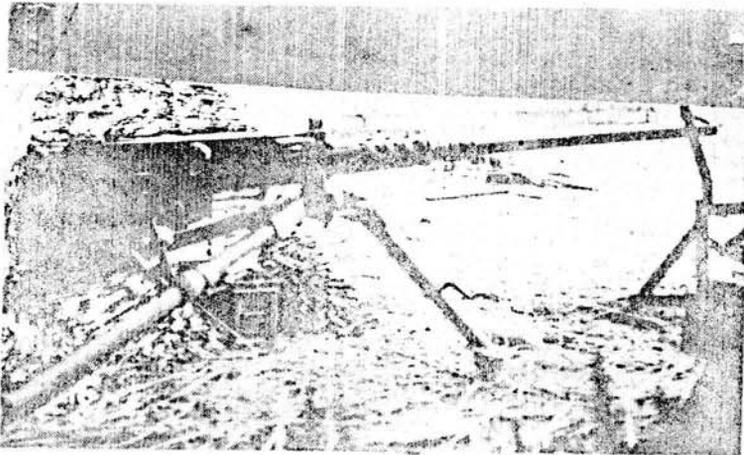
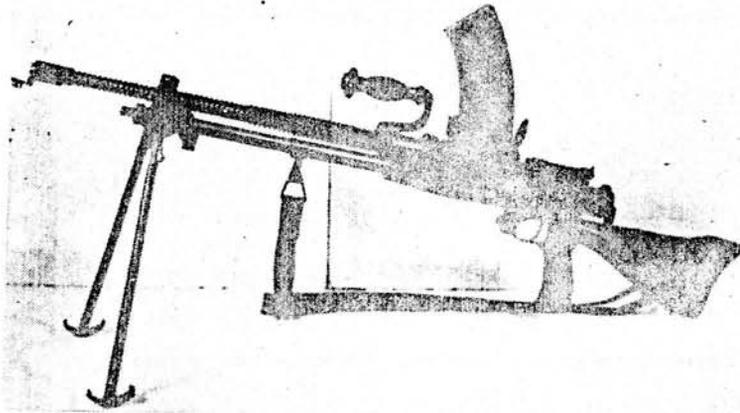
kap pasukan bergerak dari Bireuen, dengan memimpin 100 orang bersenjata lengkap (10 senjata Bren).

Pasukan ini bergerak menuju Mereudu, yang sebelumnya sudah mendapat serangan dari PRI, merebut benteng-benteng uleebalang dan menawan semua penghuninya. Kemudian diteruskan ke Lueng Putu, tempat para uleebalang Nyong, Piddie, dan dari lainnya mengadakan perlawanan gigih terhadap rakyat. Bahkan rumah uleebalang Nyong dibakar habis. Makin jauh pasukan ini makin banyak pengikutnya dan mendapatkan rampasan senjata yang banyak. Diperkirakan pasukan ini sudah menjadi 5000 pengikut. Kemudian sebelum mengadakan penyerangan ke markas Daud Cumbok di Lam Meulo, mereka bergabung dengan pasukan-pasukan lainnya, baru mengadakan pukulan terakhir terhadap Lam Meulo.⁴⁵

Ternyata serangan terakhir yang dilancarkan oleh gabungan anti Cumbok itu dapat dihentikan atau ditahan oleh pasukan Daud Cumbok.

Peristiwa Cumbok ini merupakan faktor khusus terjadinya Revolusi Sosial di Aceh, atau terjadinya Revolusi Sosial di Aceh itu merupakan lanjutan secara langsung dari peristiwa Cumbok ini.

⁴⁵ M. Nur AL Ibrahimy, Tak. Muh, Daud Beureuh, Op.cit, hal.102.



Senjata tipe lainnya yang dipergunakan dalam Perang Cumbok. Atas: senapang mesin ringan (Nambu) dan bawah senapang mesin berat (heavy browning).

C. Proses Terjadi Revolusi

"Peristiwa Cumbok telah selesai, dan Lam Meulopun hilang dari peta bumi. Nama kota itu ditukar dengan kota Bakti, untuk menghormati para pahlawan yang gugur di sana".⁴⁶

Peristiwa Cumbok ada yang mengatakan itulah revolusi sosial, tetapi sebagian dari penulis sejarah Aceh menyatakan bahwa peristiwa Cumbok itu merupakan revolusi sosial tahap pertama, dan pada tahun selanjutnya terjadi revolusi sosial tahap kedua. Tetapi bila dilihat dari keadaan sosial ekonomi maupun politik di Aceh setelah peristiwa Cumbok, maka akan terlihat tidak adanya perubahan yang mendasar dalam kedua sektor tersebut. Karena tidak adanya perubahan yang mendasar, maka dari kalangan ulama banyak memandang masih perlu adanya revolusi sosial di Aceh agar tidak lagi terjadi ketimpangan-ketimpangan sosial yang mengantar Aceh kepada peristiwa Cumbok atau peristiwa-peristiwa berdarah yang mendahuluinya.

Mr. S.M. Amin dalam bukunya 'Kenang - kenangan Dari Masa Lampau' mengatakan bahwa revolusi yang di

⁴⁶ Anthony Reid, Perjuangan Rakyat, Revolusi dan Hancurnya Kerajaan di Sumatra, *Op.cit*, hal.337

lancarkan di Aceh terhadap uleebalang adalah revolusi sosial.

"Menurut saya (M. Nur Al Ibrahimy), revolusi terhadap uleebalang di Aceh dibagi dalam dua tahap, revolusi dalam tahap pertama yang dilancarkan terhadap uleebalang termasuk dalam golongan Cumbok Adapun revolusi dalam tahap kedua yang dilancarkan oleh TPR (Tentara Perjuangan Rakyat), di bawah pimpinan Tgk. Husain Al Mujahid pada bulan Maret 1946, sebagai upaya untuk menggantikan sistem pemerintahan feodal dengan sistem pemerintahan yang demokratis, adalah revolusi sosial".⁴⁷

Sebagian dari pengamat sejarah Aceh menganggap gerakan Husain Al Mujahid terhadap uleebalang adalah gerakan liar. Di antara pengamat yang berpendapat demikian adalah Insider.⁴⁸ Tetapi M. Nur Al Ibrahimy menanggapi pendapat itu dengan mengatakan bahwa ia tidak setuju gerakan Husain Al Mujahid dikatakan gerakan liar, tetapi merupakan revolusi sosial.

"Saya (M. Nur Al Mujahid) tidak sependapat bahwa gerakan Al Mujahid itu adalah gerakan liar, akan tetapi ia adalah revolusi sosial".⁴⁹

47 M. Nur Al Ibrahimy, Tgk. Muh. Daud Beureuh, hal. 149

48 Ibid.

49 Ibid.

Menang sesuatu yang biasa bila ada yang berpendapat bahwa gerakan Al Mujahid adalah gerakan liar, karena setiap revolusi terhadap suatu tatanan atau pemerintahan selalu dipandang ilegal atau gerakan liar bila dipandang oleh mata orang-orang yang mempertahankan status quo, atau bila dilihat dari hukum pemerintahan yang dikup. Tetapi bila revolusi itu berhasil maka gerakan itu semua dianggap legal.

Dalam keterangan selanjutnya M. Nur Al Ibrahimy menegaskan :

" Bahwa Al Mujahid, lepas dari segala eksese yang terjadi selama gerakan TPR, merupakan salah seorang tokoh yang berjasa dalam meruntuhkan sistem feodal yang telah berurat akar berabad-abad dalam masyarakat Aceh".⁵⁰

Husain Al Mujahid selain ketua gerakan TPR, juga menjabat sebagai ketua Pengurus Besar Pemuda PUSA.

Gerakan kedua yang dilancarkan oleh Husain Al Mujahid beralasan sekali, karena masih banyaknya sisa-sisa feodal yang berperan aktif dalam kehidupan sosial di Aceh setelah terjadinya peristiwa Cumbok, dan ini menghambat tercapainya tercapainya keamanan di Aceh,

50 Ibid.

Untuk melaksanakan rencananya Husain Al Mujahid menghubungi dahulu Mayor Husin Yusuf, ajudan staf keamanan Divisi TRI (TPR diganti namanya sejak awal Januari 1946), yang pada waktu itu atas izin komandan divisi, Kolonel Syamun Gaharu, berada di Bireun.

"Rupanya kedua tokoh ini (Husain Al Mujahid dan Husin Yusuf) sependapat mengenai perlunya di lanjutkan revolusi sosial tahap kedua di daerah Aceh; dan ternyata apa yang direncanakan itu tidak pernah dilaporkan oleh Husin Yusuf kepada atasannya di Kutaraja".⁵¹

Setelah persiapan bergerak sudah dianggap cukup, maka awal pebruari 1946 TPR menjalankan penyerbuannya.

Daerah pertama kali yang dituju adalah daerah - daerah di wilayah Aceh Timur, terutama daerah Idi, Langsa dan Kuala Simpang.

Banyak sekali para uleebalang dan para pengikutnya yang ditangkap dan diamankan. Di antara mereka yang ditangkap dan diamankan di daerah-daerah tersebut ialah :

1. Teuku Abdullah Paloh, ia selamat dari maut setelah penangkapannya, karena jasa baik teungku/teuku Moh. Amin, salah seorang tokoh

⁵¹ Muhammad Ibrahim, Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Istimewa Aceh, Op.cit, hal.100

pimpinan PUSA.

2. Teuku Ali Basya, wedana Langsa, ia bersama beberapa rekannya yang ditahan oleh TPR terhindar dari maut, kemudian ia dibebaskan dan dibawa ke Takengon.
3. Dan masih banyak lagi selain keduanya.⁵²

Setelah mengadakan penangkapan di Aceh Timur, khususnya di Idi, Langsa dan Kuala Simpang, kemudian menggantikan kedudukan uleebalang yang anti rebublik dengan yang pro republik.

"Selanjutnya, setelah Aceh Timur berhasil dibersihkan dari apa yang disebutkannya anasir-anasir anti republik, maka TPR bergerak menuju ke Aceh Utara".⁵³

Muhammad Ibrahim, di dalam penjelasannya di atas menggunakan kalimat 'dibersihkan' dari anasir-anasir anti republik, Maksud dari kalimat ini ialah membasmi semua orang-orang yang tersangkut dalam peristiwa Cumbok dan simpatisannya, kemudian menempatkan orang-orang di luar mereka yang dicurigai atau sudah jelas ikut serta dalam peristiwa Cumbok.

52 Ibid, hal 99 - 104

53 Ibid, hal. 101, dan lihat Anthony Reid, Perjuangan Rakyat, Revolusi dan Hancurnya Kerajaan di Sumatra, hal.356 - 394.

Husain Al Mujahid bersama TPR nya menghadapi pasukan uleebalang yang tangguh, di bawah pimpinan Teuku Ibrahim. Barisan teuku Ibrahim yang tangguh ini dapat bertahan, bahkan mendesak sehingga Husain Al Mujahid meminta bantuan kepada Daud Beureuh untuk menambah pasukannya. Tgk. Daud Beureuh mengirim pasukan sejumlah yang diminta oleh Husain Al Mujahid. Setelah mendapat bala bantuan Husain Al Mujahid akhirnya dapat mendesak dan menguasai Aceh Utara.

Gerakan TPR terus melaju sampai ke daerah Pidie, pusat gerakan uleebalang yang sudah dihancurkan sebelumnya operasi ini. Perlu ditambahkan disini, bahwa operasi TPR ini selalu mendapat tambahan personel setiap memasuki sebuah daerah di Aceh.

Puncak dari operasi ini sewaktu TPR memasuki Kutaraja. Sewaktu di Kutaraja terjadi ketegangan antara simpatisan Husain Al Mujahid, T. Nyak Arif dan Syamaun Gaharu. Ketegangan itu bermula dari adanya tuntutan Husain Al Mujahid yang menghendaki kedua tokoh tersebut meletakkan jabatannya. Ketegangan itu tidak berlangsung lama dan tidak sampai menimbulkan konfrontasi fisik, karena T. Nyak Arif mau meletakkan jabatannya sebagai residen Aceh dan Syamaun Gaharu sebagai Komandan Divisi V TRI.

"Pada waktu TPR tiba di Sigli (daerah Pidie) , saya, Tgk. Abdul Wahab Seulimeuem dan ayah Gani (Abdul Gani Usman) mengajak Amir Husain Al Mujahid untuk berdialog mengenai rencana mereka hendak marah ke Kutaraja. Husain Al Mujahid menegaskan rencananya adalah untuk membebaskan T. Nyak Arif dari jabatannya dan untuk mengambil alih pimpinan TKR, untuk melanjutkan revolusi katanya, pimpinan pemerintahan dan ketentaraan tak dapat dibiarkan berada di dalam tangan feodal atau orang yang pro feodal. Ia kurang percaya kepada T. Nyak Arif dan Syamaun Gaharu katanya, disebabkan hubungan mereka dengan mayor Knotten belt, wakil sekutu yang pernah bermarkas di Kutaraja, dari sejak bulan oktober 1945 sampai pertengahan bulan nopember 1945 Selain itu, Husain Al Mujahid menganggap T. Nyak Arif seakan - akan "menutup" mata terhadap gerakan Cumbok dan peristiwa Sigli. Sedangkan Syamaun Gaharu anggap "penyebab" peristiwa Sigli".54

Sebelum Husain Al Mujahid mengerahkan pasukannya ke Kutaraja, M. Nur Al Ibrahimy, Tgk. Abdul Wahab dan ayah Gani menyarankan agar jangan terjadi pertempuran darah dan juga teman-teman seperjuangan hendaklah diberitahu agar tidak terjadi salah faham diantara mereka. Saran itu diterima baik oleh Husain Al Mujahid,

54 M. Nur Al Ibrahimy, Tgk. Muh. Daud Beureueh, Op.Cit, hal. 122.

diputuskan olehnya untuk menegaskan M. Nur dan ayah gani untuk menyampaikan maksud TPR kepada mereka dan meminta dukungan mereka untuk berunding dengan TKR.

Kemudian terjadilah pertemuan antara TPR - TKR yang dihadiri oleh Husin Yusuf dan tokoh-tokoh PUSA lainnya, seperti Nyak Neh, A. Hasyimi, Tgk. Syech Marhaban dan lainnya. Dari TKR yaitu, T. Ntak Arif, Sya^Amaun Gaharu dan T. Hamin Anwar (pemimpin-pemimpin TKR), Dari pihak TKR sepakat dengan maksud TPR, sebagaimana telah dijelaskan di atas. (Lihat Lamp. VI).

Hasil pertemuan dan kesepakatan dari pihak TKR, diberitahukan kepada Husin Al Mujahid. Setelah itu TPR masuk ke Kutaraja dalam keadaan aman, tanpa harus terjadi pertumpahan darah.

Selain itu, diluar yang dilakukan oleh TPR masyarakat Aceh juga mengadakan pembersihan. Pembersihan non kontrol itu sudah jelas tidak terkendali, bahkan menyerupai pembantaian-pembantaian. Banyak dari uleebalang yang pro republik terbunuh oleh masyarakat. Di antaranya Ahmad Jeneub, Asisten Residen Aceh Besar, Teuku Gut Hasan dan Teuku Chik Moh Said, keduanya termasuk tokoh-tokoh nasionalis juga terseret dalam konflik ini. Bahkan di Pidie sendiri hanya 2 uleebalang yang hidup dari 25 orang.

Tidak begitu lama setelah pengunduran T. Nyak Arif dan Syamaun Gaharu, Husin Al Mujahid diculik oleh sekelompok orang yang menganggap pembersihan yang dilakukan olehnya sudah keterlaluan. Untuk menghentikan operasi itu jalan satu-satunya ditempuh dengan menculik Amir Husin. Selain itu, Husin Al Mujahid juga akan dipertemukan dengan Syamaun Gaharu untuk mempertanggung jawabkan operasi yang digerakkan kepadanya. Tetapi sebelum maksud yang terakhir dilaksanakan Husin sudah dapat dibebaskan oleh orang-orang yang setia padanya.

Kembali pada proses terjadinya revolusi di atas, karena ganasnya pembasmian orang-orang Cumbok dan simpatisannya sehingga para uleebalang yang tidak sempat dibunuh menyerahkan dirinya dan berjanji tidak menuntut hak turun temurun dari jabatannya.⁵⁵

Untuk menangani hal ini agar tidak berkelanjutan, dan berakibat terjadinya pertumpahan darah di antara masyarakat Aceh, maka T. Moh Polem, uleebalang Sagi XXII mengatakan :

- "1. Hak uleebalang turun temurun menggantikan pimpinan negeri tidak lagi sesuai dengan zaman.

⁵⁵ Van Dijk, Darul Islam Sebuah Pemberontakan, - Op.Cit, hal.266

2. Uleebalang adalah warga republik Indonesia dan menghormati kesejahteraan rakyat.
3. Mereka telah memutuskan demi tercapainya organisasi yang sempurna.
4. Memohon kepada pemerintah dengan hormat agar memberikan penduduk kedua puluh dua mukim hak untuk memilih pemimpin pemimpinannya sendiri.
5. Meminta agar semua uleebalang termasuk kepala segi untuk mengundurkan diri dari jabatannya".⁵⁶

Revolusi Sosial ini berakhir dengan turunnya semua uleebalang anti republik (Cumbok) dari jabatannya dan digantikan oleh orang-orang PUSA dan simpatisannya sebagaimana termaktub dalam keterangan pemerintah pusat.

"Sebagian yang sangat besar dari jabatan-jabatan penting berada dalam tangan orang PUSA dan pengikut-pengikut mereka".⁵⁷

"Tempat mereka (uleebalang) sebagian besar diambil orang-orang PUSA".⁵⁸

Inilah akhir dari sebuah Revolusi Sosial yang

56 Ibid.

57 Ibid.

58 Ibid.

terjadi di Aceh pada tahun 1945 - 46. Untuk lebih jelasnya tentang tumbangya rezim uleebalang di Aceh lihatlah lampiran ~~-----~~ (Ancien Regiem).

D. Tumbangya Kekuasaan Uleebalang

Tumbangya kekuasaan uleebalang dimulai dari padarnya pamor mereka, kemudian terjadinya revolusi sosial berakhir dengan keluarganya peraturan daerah no. I/1946 pada tanggal 24 Juni 1946.

Peraturan itu berbunyi sebagai berikut :

"Peraturan tentang menguasai atau memiliki harta benda peninggalan uleebalang-uleebalang daerah Aceh". 59

Dalam pasal I pada peraturan tersebut dijelaskan bahwa Pemerintah daerah ditugaskan untuk membentuk majlis Penimbang.

"Adapun susunan Pengurus Penimbang sebagai berikut :

1. Ketua I : Teungku Abdul Wahab Seulimeun.
2. Ketua II : Teungku M. Husen.
3. Ketua III : Teungku H. Mustafa Ali.
4. Ketua IV : T.M. Amin
5. Ketua V : Teungku Itam Peureulak.
6. Panitera Umum: Teungku Nyak Umar".60

59 H. T.M. Amin, Susunan Pemerintah Republik di Aceh, MSI, hal.7

60 Ibid.

Dengan keluarnya keputusan atau peraturan daerah tersebut di atas menunjukkan bahwa ulcebalang kontra revolusi kemerdekaan RI. sudah kekuasaannya di Aceh.

Majlis ini mempunyai dua hak yang luas biasa. Pertama, Majlis mempunyai hak kehakiman dan keputusannya merupakan vonis yang tidak dapat diganggu gugat. Kedua, dalam melaksanakan kewajibannya Majlis tidak harus menurut peraturan (susunan acara atau proses) ke hakiman, melainkan tergantung atas kebijaksanaan Majelis Penimbang semata-mata.⁶¹

Hak istimewa/luar biasa ini mengundang pro dan kontra di kalangan masyarakat, tetapi tidak sampai menimbulkan konfrontasi fisik. Memang pemberian hak istimewa ini menyimpang dari ketentuan yuridis, tetapi masalah ini tidak bisa hanya dilihat dari satu sudut saja, seyogyanya ditinjau pula latar belakang timbulnya, masalah dan suasana pada waktu itu, dimana memerlukan suatu penyelesaian yang cepat dan tuntas.

Setelah Majelis Penimpang dibentuk mulailah mereka bekerja dengan tugas-tugas sebagai berikut :

⁶¹ M. Nur Al. Ibrahimy. Tgk. Muh. Daud Beureueh, Op.Cit, hal.151

1. Mengumpulkan harta benda yang bergerak yang selama sebelum terbentuknya markas - markas kenegerian itu tidak menentu.
2. Mendaftarkan harta benda tetap, seperti kebun-kebun, sawah dan lain-lain.
3. Mengumpulkan dan mendaftarkan hasil kebun-kebun dan hasil sawah-sawah dan hasil dari lain-lain.
4. Memisahkan harta benda uleebalang sendiri dan harta benda ahli warisnya yang tidak bersangkutan.

Sebagian dari sisa-sisa feodal tidak menyetujui penyelesaian harta benda uleebalang yang dilakukan oleh Majelis Penimbang, tetapi mereka tidak bisa menunjuk badan yang lain yang akan mengurusnya, karena hampir badan-badan pemerintah setelah terjadinya Revolusi sosial yang panjang banyak diduduki oleh orang PUSA atau simpatisannya.

Inilah akhir dari sejarah Revolusi Sosial di Aceh dan pengkajian historis tentang peranan PUSA di dalam Revolusi Sosial tersebut, dimana ulama - ulama yang bergabung di dalam organisasi tersebut selain mampu berkiprah sebagai ilmuwan yang menyelamatkan masyarakat dari kebodohan agidah, juga penyelamat ma-

syarakat dengan menumbangkan sumber malapetaka bagi masyarakat, baik dari luar (kolonial Belanda) dan dari dalam (Uleebalang, kaum feodal).